



---

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI WARGA TERDAMPAK  
LUMPUR LAPINDO DI KABUPATEN SIDOARJO**

**REGIONAL GOVERNMENT POLICY THROUGH WELFARE IMPROVEMENT  
PROGRAMS FOR LAPINDO MUD INFLUENCES IN SIDOARJO REGENCY**

**Muhammad Fajrul Falah<sup>1</sup>, Aulia Septiana<sup>2</sup>, Sri Wibawani<sup>3\*</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Diterima: 5 Mei 2020; Disetujui: 3 Juni 2020; Dipublish: 1 Desember 2020

\*Corresponding Email: [sriwibawani.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:sriwibawani.adneg@upnjatim.ac.id)

---

**Abstrak**

Mengatasi kemiskinan adalah sebuah upaya untuk memberdayakan orang miskin agar dapat hidup mandiri, baik pada sisi ekonomi, budaya, dan politik. Begitu banyak upaya dari pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi, namun tetap saja kemiskinan belum bisa sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Penelitian kami tentang bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo memang telah dilakukan beberapa kali, namun disini peneliti tertarik untuk mengevaluasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Perkotaan sebuah program kepedulian Pemerintah terhadap para korban sekitaran lumpur Lapindo di Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program pelaksanaannya sudah sesuai dan tertuju dengan apa yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah dan Sasaran warga terdampak lumpur Lapindo, setiap program intervensi dan juga ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pencapaian usaha tersebut dari Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo atas semakin berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan warga miskin yang diberlakukan oleh lumpur lapindo dimana adalah sasaran program.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, PNPM-MP, Implementasi Kebijakan.

**Abstract**

*Overcoming poverty is an effort to empower poor people to be able to live independently, both on the economic, cultural, and political sides. So many attempts from the government to make various policies to overcome the problems of poverty that occur, but still poverty cannot be completely overcome by the government. Our research on the Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo has indeed been carried out several times, but here the researcher is interested in evaluating the policy of the Urban Independent National Community Empowerment Program (PNPM), a Government care program for victims of the Lapindo mudflow in Sidoarjo. This study aims to find out whether the implementation program is appropriate and aimed at what was planned beforehand by the government and the target of residents affected by the Lapindo mudflow, each intervention program and also wants to know the extent of the effect of business achievement from the Urban Independent Community Empowerment Program (PNPM) in Sidoarjo Regency over the decreasing poverty rate and increasing welfare of the poor imposed by Lapindo mud which is the target of the program.*

**Keywords:** Poverty, PNPM-MP, Policy Implementation.

**How to Cite:** (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Program Peningkatan Kesejahteraan bagi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Politik (JSEP)* 1(4):

---

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan telah menjadi suatu permasalahan yang tak berujung bagi pemerintah. Secara umum kemiskinan terjadi karena pemerintah yang kurang tanggap mengatasi permasalahan tersebut dan masyarakat Indonesia yang juga kurangnya SDM. Secara istilah, asal mula kata dasar miskin yang artinya tidak memiliki harta benda atau kekurangan (Barlinti, 2007). Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan daerah yang dimana menyediakan suatu pelayanan, prakarsa, dan mengedukasi masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. Perbandingan penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, namun tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur sendiri masih terbilang cukup tinggi. Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan angka penduduk pada tahun 2019 mencapai 39,70 juta jiwa. Namun di Jawa Timur sendiri jumlah penduduk miskin mencapai 4.112,25 ribu jiwa dengan persentase 10,37% pada bulan Maret 2019. Berdasarkan data dari (BPS, 2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2017 sebanyak 4.405,27 ribu jiwa dengan persentase 11,20%. Pada bulan September tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4.292,15 ribu jiwa dengan persentase 10,85%. Pada bulan September tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4.056,00 ribu jiwa dengan persentase 10,20%. Berdasarkan data tersebut terjadi angka penurunan dari tahun 2017-2019 dari yang semula 4.405,27 ribu jiwa menjadi 4.056,00 ribu jiwa.

Konstitusi negara mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh warga Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Yahya, 2009). Tanggung jawab negara untuk

kesejahteraan bagi masyarakat diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2009 berisi tentang Kesejahteraan Sosial. Legislasi itu menunjukkan upaya untuk menaggulangi kemiskinan di Indonesia dilakukan dengan tindakan strategi kebijakan serta program serta kegiatan yang akan dilakukan terhadap setiap orang, keluarga, kelompok ataupun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup yang lebih baik. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat suatu wilayah yang terkena bencana luapan Lumpur Lapindo sehingga mengubur puluhan desa disekitarnya, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan harta benda termasuk tempat tinggal yang kemudian masyarakat terkatung-katung sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat bertahan hidup sampai kehidupannya Kembali normal seperti sedia kala, disini pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya akan mengupayakan kesejahteraan kembali bagi masyarakat dan akan membantu untuk membangkitkan kehidupan kembali di daerah yang terkena dampak Lumpur Lapindo tersebut. Berdasarkan pembahasan diatas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah yang difokuskan pada dampak bencana Lumpur Lapindo kepada masyarakat yang terkena lalu disini bagaimana peran kebijakan pemerintah yang dimana menciptakan program kesejahteraan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan untuk menurunkan suatu masalah kemiskinan serta juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdampak lumpur Lapindo oleh Pemerintah Daerah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Kemiskinan**

### **Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu (Mulyadi, 2016). Tingkatan pada kemiskinan dapat dinilai atau bahkan ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran materi, dan kondisi fisik dari bangunan tersebut atau dari lingkungan permukiman itu sendiri. Sedangkan ada lagi pengertian Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (Akhmad, 2016). Namun disini kemiskinan terjadi akibat adanya suatu bencana yang terjadi sehingga masyarakat kehilangan hampir seluruh harta bendanya yang mengakibatkan kesulitan secara finansial ekonomi karena dampak bencana tersebut. Kemiskinan yang terjadi berupa kejadian yang tidak terprediksi sebelumnya bukan akibat orang itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya ataupun orang itu tidak punya lapangan pekerjaan, akan tetapi bencana yang menyebabkan seketika kehidupannya berubah dan terpaksa harus kehilangan semua asset-aset berharganya seperti tempat tinggal, dll. Walau kemiskinan ini bisa dikatakan sementara, namun tetap saja sampai bantuan ganti rugi dari pemerintah tiba mereka akan hidup dalam kondisi keterbatasan dan kekurangan.

### **Indikator-indikator Kemiskinan**

Untuk memperoleh solusi penurunan angka kemiskinan, penting bagi kita untuk menelusuri secara detail apa saja indikator penyebab kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan yang dimana diambil dari Badan Pusat Statistika, seperti berikut yaitu kurangnya potensi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi (sandang, pangan, dan papan), tidak ada akses akan kebutuhan yang diutamakan (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan

transportasi), jaminan suatu masa depan yang kurang menjanjikan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga), dan lemahnya prinsip terhadap suatu rintangan yang bersifat perorangan ataupun massa, dan minimnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya suatu sumber daya alam yang sudah dimiliki, serta kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat, dan tidak memiliki akses dalam lapangan kerja dan suatu mata pencaharian yang saling berkesinambungan, kurangnya upaya dalam berusaha untuk memperbaiki yang disebabkan karena cacat fisik maupun mental, tidak ada ketrampilan dan kecanduan social (seperti anak-anak yang terlantar, dan wanita korban kekerasan rumah tangga,serta janda miskin,dan kelompok marginal dan terpencil).

### **Dampak Kemiskinan Terhadap**

Sehingga munculnya suatu dampak yang terjadi pada masyarakat yang muncul akibat dari kemiskinan diantaranya adalah kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan dan sangat rendah dari kata layak ini berarti peningkatan masalah kemiskinan yang meningkat menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tingkat kematian menjadi meningkat, ini menjadi suatu masalah besar yang disebabkan masalah perekonomian yang sering dialami dan munculnya kematian akibat kelaparan atau menurunnya tingkat kesehatan yang menjadikan mereka tidak mampu berobat ke rumah sakit untuk kesembuhannya dan juga bisa menimbulkan suatu depresi hingga bunuh diri karena putus asa tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Banyaknya kasus pada masyarakat Indonesia yang memiliki masalah perekonomian dan menyebabkan kelaparan yang dimana tidak lepas dari lemahnya dalam membeli kebutuhan akan makanan pokok sehari-harinya, tidak bersekolah pun

menyebabkan banyaknya masyarakat di negara Indonesia tidak memiliki pengetahuan yang luas dalam memperoleh mata pencarian dan tidak memiliki kompeten khusus untuk mencapai suatu pekerjaan dan suatu yang terbilang cukup. Dan lebih baik. Dengan adanya kemiskinan pun tingkat kejahatan menjadi meningkat dikarenakan terpaksa dalam memenuhi kebutuhannya atau pendapatannya dan pada akhirnya jalan kriminal pun dilakukan dengan cara merampok dll karena dengan yang lebih baik membutuhkan uang modal dan keterampilan yang memadai.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif dimana peneliti mengangkat kasus pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui PNPM Mandiri (Risnawan, 2013). Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Krisnawati, 2007). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literature review yang diperoleh dari jurnal terdahulu dan sumber artikel lain yang dapat mendukung penelitian ini. Hasil dari berbagai literatur yang telah diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi definisi, pola, dan model pengentasan kemiskinan di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Bagi Warga Terdampak Lumpur Lapindo, Kabupaten Sidoarjo. Standar dan Sasaran Kebijakan PNPM - MP**

Program PNPM bagi warga terdampak lumpur Lapindo berjalan sesuai dengan prosedur, standart dan sasaran yang sesuai seperti mendata para masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketepatan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dalam , serta lebih memperhatikan rakyat miskin untuk dilindungi. Terutama rakyat miskin yang lebih membutuhkan PNPM. Di dalam memberikan dan memperbaiki suatu fasilitas sarana dan prasarana pada lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi melalui PNPM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) didampingi oleh seorang atau kelompok relawan yang mampu untuk mendukung suatu program dalam menyusun PJM-Pronangkis (Program Jangka Menengah-Program Penanggulangan Kemiskinan) seperti berikut : aspek: a). Aspek Lingkungan; b). Aspek Sosial; dan c). Aspek Ekonomi.

### **Sumberdaya dalam PNPM - MP**

Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses untuk melalui penyesuaian secara optimal yang dapat didapatkan oleh seorang pegawai, dan pekerjaan suatu organisasi didalam lingkungan ,maka setiap kelompok pegawai dapat mewujudkan peningkatan kepuasan dan tujuan sesuai keinginan dan tujuan suatu organisasi. Untuk meningkatkan sumberdaya yang telah dimiliki melalui PNPM kelompok yang bersedia membantu mengadakan rangkaian kegiatan untuk ibu rumah tangga yang. Peristiwa tersebut memiliki maksud tujuan supaya ibu rumah tangga memiliki ketrampilan dan kreatifitas yang lebih baik lagi. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat memiliki inovasi dalam membuka usaha sendiri. Dengan adanya program ini dapat menunjukkan dengan suatu kegiatan masyarakat dengan penguluran dana dari kelompok swadaya masyarakat, penyuluran dana tersebut memiliki

manfaat untuk kegiatan pemberdayaan pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi khususnya..

### **Karakteristik Agen Pelaksana dalam PNPM – MP**

Jika dilihat dari sasaran, PNPM menempatkan prioritas sasarannya adalah mereka yang kurang beruntung dari segi ekonomi, geografi dan sosial budaya artinya sasaran tersebut miskin harta, miskin ilmu, miskin pranata sosial (Kusumandari, 2015). Agen pelaksana dalam pengimplementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri bagi warga terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat “Maju Sejahtera” yang dengan sukarela menjadi agen pelaksana PNPM. Peran agen pelaksana PNPM sangat baik karena dengan tanggung jawab yang tinggi para relawan menjalankan tugas demi tercapainya tujuan PNPM. Dengan ini yang menjadi pelaksana perhatian khusus terdiri dari sebuah organisasi formal dan organisasi informan yang akan ikut andil terkait pengimplementasian kebijakan publik. Dan berdasarkan keadaan dilapangan sikap dari agen pelaksana sangat baik dan aktif dalam menjalankan segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan dengan adanya sikap baik dari para agen pelaksana proses pengimplementasian program ini dapat berjalan dengan baik.

### **Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi dalam PNPM-MP**

Dalam tahap berikut ini faktor lingkungan sosial dalam proses implementasi PNPM yang menjadi suatu hambatan dalam program. Kebiasaan masyarakat yang cenderung primitif hingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan barunya yang jauh lebih layak dari sebelumnya. Seperti halnya perspektif

yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Rodiyah, n.d.). Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondisinya saat ini belum stabil juga dapat menjadi pemicu kegagalan dalam kinerja implementasi kebijakan, dan keadaan dilapangan para pelaksana program telah memberikan dan mengusahakan secara penuh pembangunan sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat sekitar, seperti adanya pembangunan toilet umum yang diperuntukkan untuk masyarakat yang belum memiliki kamar mandi dan tempat pembuangan yang layak, akan tetapi butuh waktu penyesuaian untuk dapat membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Sehingga pada awalnya pembangunan toilet umum belum dapat difungsikan dengan baik dan sebagaimana semestinya oleh masyarakat.

### **Faktor yang Menghambat Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Bagi Warga Terdampak Lumpur Lapindo, Kabupaten Sidoarjo**

Suatu program kebijakan dari pemerintah pasti akan selalu mendapatkan hal yang dinamakan hambatan atau dukungan dari masyarakat. Demikian dengan PNPM ini sendiri, selain mendapat dukungan dari masyarakat akan tetapi masih ada hal – hal yang menjadi faktor penghambat. Ada beberapa variabel yang terjadi dalam proses implementasi. Segala kegiatan implementasi kebijakan selalu mengalami hambatan dan dukungan dari pihak lain. Faktor penghambat dalam proses implementasi PNPM ialah kurangnya kedisiplinan dari masyarakat sekitar dan juga masih banyak masyarakat yang kurang dalam menjaga lingkungan hidup sekitarnya sehingga kebiasaan yang kurang baik juga tetap dilakukan tanpa adanya rasa bersalah. Sehingga butuh

waktu untuk membiasakan dan memperkenalkan kebiasaan yang baik kepada masyarakat itu sendiri.

### **Faktor yang Mendukung dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Bagi Warga Terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo**

Faktor yang mendukung dalam implementasi PNPM yaitu partisipasi dari masyarakat yang sangat besar sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Partisipasi dari masyarakat inilah yang kemudian dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat korban lumpur Lapindo. Salah satu variabel dalam implementasi yaitu bagaimana kondisi sosial masyarakat yang mendukung program ini seperti pembangunan yang dilakukan di wilayah terdampak lumpur Lapindo. Hal yang terjadi disini ialah bidang pembangunan seperti adanya drainase air, toilet umum dan kegiatan santunan rutin yang diberikan kepada masyarakat yang berhak, sehingga dalam hal ini dapat membantu dalam mempermudah masyarakat yang lebih baik lagi. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, masyarakat merasa sedikit terbantu dengan suatu kondisi suatu lingkungan sosial semakin membaik.

### **SIMPULAN**

Implementasi program yang diciptakan oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo dan warga miskin korban luapan Lumpur Lapindo sebagai kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan setidaknya memuat: (1) Meningkatkan dan peyempurnaan pada program-program pembangunan masyarakat (2) peningkatan desentralisasi dan otonomi untuk memutuskan suatu keputusan (3) Meningkatnya pemberdayaan manusia secara optimal dan efektif, dengan bimbingan yang baik dan lebih insentif. Dampak dalam

pencapaian hasil PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo sendiri dalam meminimalisir maraknya kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang telah terkena pada dampak lumpur Lapindo sebagai kelompok sasaran program.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barlinti, Y. S. (2007). Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. 4(3), 158-167.
- Yahya, K. (2009). Evaluasi Kebijakan Program Kemiskinan Untuk warga Terdampak Lumpur Lapindo Di kabupaten Sidoarjo.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2012). Profil Kemiskinan di Jawa Timur September 2019. 45, 1-7.
- Akhmad, E. P. A. (2016). Susunan Dewan Redaksi Ketua Penyunting Anggota Penyunting Distribusi: I Made Dwinanto R., Makdin Sijabat. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 7(1), 1-20.
- Rodiyah, Y. M. I. (n.d.). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 89-100.
- Risnawan, W. (2013). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Murti, R. P. L. dan I. (2015). Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo). 195-201.
- Handayani, A. S. dan B. L. (2017). Bertahan Hidup Dalam Kubangan Lumpur (Studi tentang Korban Lumpur Lapindo di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Sidoarjo). IV, 6-11.
- Asrawi Madjid, V. A. J. M. dan P. C. W. (2015). Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( Pnpm ) Mandiri Perkotaan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Kotamobagu. 15(04), 113-123.
- Elmaghifra Putri Elika, Risna Resnawaty, A. S. G. (2017). Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur. 4, 205-216.
- Anindita, A. (2015). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran Dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo.

- Fernando, R., Sumolang, A., Pioh, N., Kairupan, J., Kemiskinan, K. P., Manusia, S. D., & Kunci, K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bitung. 1.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Vi*(September), 98-102.
- Safaruddin, Fatmawati, B. (2010). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 2.
- Pandipa, A. K. H. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. *03*(September).
- A.Matualage, P. (N.D.). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting).
- Wanita, L. (2011). Singingi Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011. 1-10.
- Wulan, Y. C., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama ( Kube ) ( Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama ( Kube ) Di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo , Jawa Timur ) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Adiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . Mt Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Lppm Unisma Jl . Mt Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia. *13*(4), 104-109.
- Sangadji, S., Abadi, T. W., & Fauziah, L. (2019). Karakteristik Kemiskinan Dan Penanggulangannya Di Kabupaten Sidoarjo. *31*(2), 495-506.
- Sukmana, O. (2017). Konflik Horisontal Antar Kelompok Korban Bencana Lumpur Lapindo. *3*(1), 78-98.
- Dewi, P. K., Badan, S., Penyuluhan, K., & Tengah, P. J. (2015). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( Pnpm ). *6*(2), 14-27.
- Kusumandari, R. B. (2015). Peran Pnpm Dalam Upaya Mobilitasi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang. *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, *4*(2), 162-172. <https://doi.org/10.15294/Jejak.V4i2.4651>
- Alimudin, R., Anggara, O. C. I., & Wasa, N. (N.D.). Mengatasi Kemiskinan. 3-7.
- BPS. (2019). Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019. *Berita Resmi Statistik*, *45*, 1-8.
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Kajian*, *21*(3), 221-236.